



## **BUPATI KUTAI TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

#### **BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya beberapa pasal dan lampiran dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan dan perubahan atas beberapa pasal dan lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diubah dan diatur kembali beberapa pasal dan lampiran dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam pasal dan lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 4 dimuatan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien, terarah, terkendali, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - (2) Pengelolaan keuangan desa / Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
  - (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis dan administrasi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) beberapa hurufnya diubah dan ditambah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Alokasi Dana Desa Sekretariat Kabupaten dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan untuk persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama dilampiri:
  - a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan LPM Desa atas pelaksanaan pembangunan fisik 100 % dari ADD tahun 2009 yang diketahui / ditanda tangani oleh RT dan Dusun lokasi pembangunan;
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 100% Tahun 2009;
  - d. Laporan Hasil Fasilitas dan Monitoring Tim Pendamping ADD Kecamatan;
  - e. Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa;
  - f. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembahasan R-APBDesa Tahun Anggaran 2010;
  - g. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2010;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa Tahun 2010;
  - i. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa menjadi Perdes APBDesa, dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa;
  - j. Keputusan BPD tentang Pengesahan APBDesa Tahun Anggaran 2010;

- k. Evaluasi dan Pertimbangan Camat atas APBDDesa T.A. 2010;
- l. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
- m. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- n. Surat Pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa;
- o. Surat Pengesahan SPPD dari Sekdes;
- p. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Belanja Desa, kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- q. SPJ Triwulan Keempat, BKU, dan Buku Kas Harian;
- r. RKA ADD dan DPA ADD serta AKB ADD;
- s. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD BPD dan RPD ADD Lembaga Kemasyarakatan yang menerima dana ADD;
- t. SK Kepala Desa, SK Sekretaris Desa dan SK Perangkat Desa;
- u. SK Pengurus BPD, Perdes / SK Lembaga Kemasyarakatan, dan SK pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
- v. Pertimbangan Teknis / checklist Tim Pendamping ADD Kecamatan;
- w. Laporan Pelaksanaan ADD tahun 2009, dengan dilampiri bukti foto-foto fisik / kegiatan;
- x. Buku Bank dan NPWP Desa serta Bukti setor pajak / Buku Pajak;
- y. Laporan dan Buku Inventarisasi Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
- z. Daftar Specimen Tanda Tangan dan Stempel Lembaga Desa;
- aa. SK Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
- bb. SK Panitia Barang dan Jasa / Pengadaan Pekerjaan;
- cc. SK Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa / Pemeriksa Pekerjaan;
- dd. Berita Acara Musrenbang desa / Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang desa dan RKP Desa, dengan dilampiri Daftar Hadir;
- ee. Berita Acara Musyawarah Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial, dengan Lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan;
- ff. Berita Acara Belanja Hibah (kalau ada) dan SK BPD Persetujuan Belanja Hibah;
- gg. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- hh. Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- ii. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2009 oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;



- jj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Tahun 2009;
- kk. Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembabasan LKPj / LPPD Tahun 2009;
- ll. Notulen dan Berita Acara Rapat Pembabasan LKPj Tahun 2009 dan Berita Acara (BA) Penerimaan BPD atas LKPj Kades Tahun 2009;
- mm. SK BPD Persetujuan/Penerimaan atas LKPj Tahun 2009;
- nn. BA Musdes Perencanaan Penggunaan ADD 2010 yang ditandatangani oleh Kades, Sekdes, Kaur Pemd, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM, RT/Dusun/Adat/PKK/Tokoh Masyarakat/dan pihak berkepentingan lainnya;
- oo. Notulen dan Daftar Hadir Musdes Perencanaan Penggunaan ADD Tahun 2010;
- pp. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa Tahun 2010 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2010;
- qq. Persetujuan BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2010;
- rr. SK Kades Penetapan Kegiatan Pembangunan Desa 2010;
- ss. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan ADD Triwulan Pertama;
- tt. Surat Persetujuan BPD atas Pencairan ADD Triwulan Pertama yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- uu. Persetujuan BPD dan LPM Desa atas Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Desain Gambar kegiatan fisik yang ditetapkan;
- vv. Untuk Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan SK Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Pembangunan, SK Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan, Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa dilampiri daftar hadir, RAB / Gambar Rencana Pembangunan, SPK Pembangunan, Foto Fisik, dokumen kegiatan, dan persyaratan kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- ww. Kegiatan Pembangunan Fisik tidak boleh dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Aparat Kantor Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- xx. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan SPJ ADD.

- (2) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan selanjutnya, Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur setelah diverifikasi Tim Pendamping ADD Kecamatan, yang dilampiri:



- a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Kedua yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Surat Pengesahan SPJ ADD dari Sekretaris Desa;
  - c. Surat Pengesahan SPPD dari Sekretaris Desa;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Belanja Desa, SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - e. Laporan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama, dilampiri foto-foto kegiatan dan foto-foto fisik / barang dari belanja modal;
  - f. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - g. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - h. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan sebelumnya;
  - i. BKU bulan berjalan dan Bukti Setor Pajak (apabila ada);
  - j. Realisasi perkembangan pembangunan fisik dan keuangan (RPFK) sebelumnya (apabila ada) dilampiri foto-foto fisik dan kegiatan;
  - k. Laporan hasil fasilitasi / monitoring atas pelaksanaan ADD dari Tim Pendamping ADD Kecamatan;
  - l. Pertimbangan Teknis / cheklis Tim Pendamping ADD Kecamatan atas fasilitasi monitoring pelaksanaan ADD dan verifikasi SPJ ADD;
  - m. Surat Persetujuan Camat tentang Pencairan Alokasi Dana Desa;
  - n. Surat Persetujuan dari BPD untuk pencairan ADD Triwulan selanjutnya yang ditanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
  - o. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPM Desa atas pelaksanaan pekerjaan fisik yang diketahui / ditanda tangani oleh RT dan Dusun lokasi pembangunan (jika ada);
  - p. Revisi APBDesa, Revisi RKA/DPA ADD dan AKB ADD apabila ada pergeseran penerimaan atau belanja desa dengan dilampiri Berita Acara Pembahasan Bersama dan persetujuan BPD dan diketahui Camat;
  - q. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai bahan kelengkapan SPJ ADD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf a diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
  - b. Untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen).
4. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

Kegiatan-kegiatan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (a), yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
  - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
  - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
  - e. Teknologi Tepat Guna.
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
  - g. Pengembangan sosial budaya.
  - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.
5. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah dan dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 15

Kegiatan-kegiatan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (b), yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sesuai dengan kebutuhan desa.

6. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten;



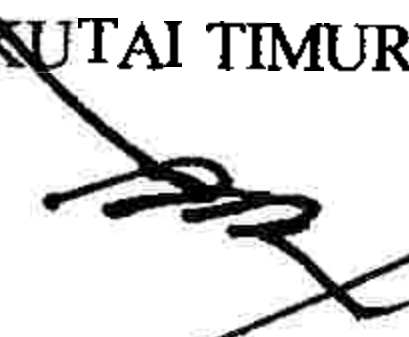
- (3) Dasar penyusunan perubahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat;
  - d. Keadaan luar biasa;
- (4) Perubahan APBDDesa bersama Revisi RKA ADD dan DPA ADD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (5) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDDesa dan Revisi RKA ADD dan DPA ADD adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa dan penetapan dokumen RKA ADD dan DPA ADD.
7. Bentuk-bentuk format lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sebagian diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perubahan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Februari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Juli 2010  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR



**DAFTAR LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7  
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

|    |          |       |   |                                                         |
|----|----------|-------|---|---------------------------------------------------------|
| 1. | Lampiran | V     | : | Buku Kas Umum                                           |
| 2. | Lampiran | X     | : | KOPBPD                                                  |
| 3. | Lampiran | XV    | : | RKAADD                                                  |
| 4. | Lampiran | XVI   | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa          |
| 5. | Lampiran | XVII  | : | Tahapan Pengambilan Dana ADD Anggaran Kas Belanja (AKB) |
| 6. | Lampiran | XVIII | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                    |

**LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 11 JULI 2010**

**BUKU KAS UMUM**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

| NO. | TANGGAL | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN<br>(Rp.) | PENGELUARAN<br>(Rp.) |
|-----|---------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1   | 2       | 3             | 4      | 5                   |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         |               |        |                     |                      |
|     |         | JUMLAH        |        |                     |                      |

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Jumlah bulan / tanggal             | Rp. | Rp. |
| Jumlah sampai bulan lalu / tanggal | Rp. | Rp. |
| Jumlah semua s/d bulan / tanggal   | Rp. | Rp. |

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
 Oleh kami didapat dalam kas Rp. .... ( ..... Dengan huruf)  
 Terdiri dari :  
 Tunai Rp. ....  
 Saldo Bank Rp. ....  
 Surat Berharga Rp. ....

....., tanggal .....

**MENGETAHUI  
KEPALA DESA,**

**BENDAHARA DESA,**

~~BUPATI KUTAITIMUR,~~

**H. ISRAN NOOR**



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 27 TAHUN 2010  
TANGGAL : 14 JULI 2010

**KOPBPD**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Persetujuan Pencairan Alokasi  
Dana Desa Tahun 2010 Triwulan ....  
Desa.....Kecamatan....

.....2010  
K e p a d a  
Yth. Bapak Bupati Kutai Timur  
C.q. Kepala BAPEMAS & PEMDES  
di  
SANGATTA

Berdasarkan hasil pengawasan atas Belanja Desa dari penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan .... (....) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. .... (.....) oleh Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dalam rencana belanja desa pada dokumen APBDesa ..... Tahun 2010, dokumen RKA ADD / DPA ADD dan AKB ADD Tahun 2010, dengan rincian nilai pertanggungjawaban ADD Triwulan .... (...) sebagai berikut:

Belanja Aparatur dan Operasional Pemdes = Rp. ....  
Belanja Pemberdayaan Masyarakat = Rp. ....  
Total ADD Triwulan .... (...) = Rp. ....

Bersama ini kami memberikan persetujuan untuk Pencairan dana ADD Triwulan ..... (....) Tahun 2010, Desa ..... Kecamatan ..... dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Aparatur dan Operasional Pemdes = Rp. ....  
Belanja Pemberdayaan Masyarakat = Rp. ....  
Total ADD Triwulan .... (....) = Rp. ....

Demikian Surat Persetujuan ini kami berikan sebagai bahan kelengkapan pencairan ADD dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Bersama Oleh:

KETUA BPD....

WAKIL KETUA BPD....

SEKRETARIS BPD....

Anggota BPD....

Tembusan Yth ;

1. Bapak Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai Laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sebagai Laporan)
3. Kepala ITWILKAB Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR

**H. ISRAH NOOR**



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
ALOKASI DANA DESA  
( DPA-ADD)  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE DESA : ..... CONTOH

PROGRAM :  
KEGIATAN :  
TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN :  
SASARAN :  
BELANJA DESA :  
JUMLAH BELANJA OP. PEMDES :  
JUMLAH ADD TAHUN 2010 :  
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN :

| KODE REKENING                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | URAIAN                                         | JUMLAH SATUAN | HARGA SATUAN<br>(Rp) | TOTAL(Rp) | KET |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----|--|
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | BELANJA TIDAK LANGSUNG                         |               |                      | Rp. ....  |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | BELANJA LANGSUNG                               |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG |               |                      | .....     |     |  |
| Rencana Belanja Langsung dan Tidak Langsung<br>Triwulan I Rp. ....<br>Triwulan II Rp. ....<br>Triwulan III Rp. ....<br>Triwulan IV Rp. ....<br>TOTAL Rp. .... |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA DESA .....                              |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                |               |                      |           |     |  |
| DISETUJUI :<br>KETUABPD .....                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | DISAHKAN OLEH :<br>CAMAT .....                 |               |                      |           |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | NIP. ....                                      |               |                      |           |     |  |

BUPATI KUTAITIMUR,  
  
H. ISRAN NOOR



TAHAP PENGAMBILAN DANA ADD  
ANGGARAN KAS BELANJA ( AKB )  
TAHUN ANGGARAN 2010

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KODE DESA : .....

| NO  | KODE REKENING | JENIS KEGIATAN                                  | BIAYA (Rp) | TAHAPAN PENGAMBILAN ADD |             |              |             | KET |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
|     |               |                                                 |            | TRIMULAN I              | TRIMULAN II | TRIMULAN III | TRIMULAN IV |     |
|     |               |                                                 |            | 30%                     | 30%         | 20%          | 20%         |     |
| I.  |               | Belanja Aparatur dan Organisasi Pemerintah Desa |            |                         |             |              |             |     |
| II. |               | Belanja Pemberdayaan Masyarakat                 |            |                         |             |              |             |     |
|     |               | JUMLAH                                          |            |                         |             |              |             |     |

Desa ..... 2010  
Bendahara Desa

Nama Jelas

Disetujui :  
Ketua BPD .....

Nama Jelas

Disetujui :  
Kepala Desa .....

Nama Jelas

Mengesahkan,  
Camat .....

Nama Jelas  
NIP. ....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

## LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TANGGAL : 11 JULI 2010

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

| KODE REKENING | URAIAN                                                     | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| <b>1</b>      | <b>PENDAPATAN</b>                                          |                  |                |     |
| <b>1.1</b>    | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                                |                  |                |     |
| 1.1.1         | Hasil usaha Desa                                           |                  |                |     |
| 1.1.1.1       | Hasil Usaha Lumbung Desa (BUMDesa)                         |                  |                |     |
| 1.1.1.2       | Hasil Usaha Koperasi                                       |                  |                |     |
| 1.1.1.3       | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2         | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa                            |                  |                |     |
| 1.1.2.1       | Tanah Kas Desa                                             |                  |                |     |
| 1.1.2.1.01    | Hasil Sewa / Penggarapan Tanah Kas Desa                    |                  |                |     |
| 1.1.2.1.02    | Hasil Sewa Titisara ( Pelelangan )                         |                  |                |     |
| 1.1.2.1.03    | Hasil Sewa Titisara Perkebunan                             |                  |                |     |
| 1.1.2.1.04    | Hasil Sewa Tanah Lapangan                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.1.05    | Hasil Sewa Tanah untuk Lahan Parkir                        |                  |                |     |
| 1.1.2.1.06    | dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.2       | PasarDesa                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.2.01    | Hasil Sewa / Kontrak Pasar Desa                            |                  |                |     |
| 1.1.2.2.02    | Hasil Pungutan Pasar Desa                                  |                  |                |     |
|               | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.3       | Pasarhewan                                                 |                  |                |     |
| 1.1.2.3.01    | Hasil sewa tempat                                          |                  |                |     |
| 1.1.2.3.02    | Hasil Pungutan Pasar Hewan                                 |                  |                |     |
| 1.1.2.3.03    | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.4       | Tambatan Perahu                                            |                  |                |     |
| 1.1.2.4.01    | Hasil sewa tempat                                          |                  |                |     |
| 1.1.2.4.02    | Hasil Pungutan Desa                                        |                  |                |     |
| 1.1.2.4.03    | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.5       | BangunanDesa                                               |                  |                |     |
| 1.1.2.5.01    | Hasil Sewa Gedung Pertemuan                                |                  |                |     |
| 1.1.2.5.02    | Hasil Sewa Perlengkapan Bangunan ( Kursi,Meja, Tenda dll.) |                  |                |     |
| 1.1.2.5.03    | Hasil Sewa sara prasarana bangunan olah raga               |                  |                |     |
| 1.1.2.5.04    | Hasil Sewa Gedung Bulu Tangkis                             |                  |                |     |
| 1.1.2.5.05    | Hasil Sewa Gedung Futsal                                   |                  |                |     |
| 1.1.2.5.06    | Hasil Sewa Gedung Basket                                   |                  |                |     |
| 1.1.2.5.07    | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.6       | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa                         |                  |                |     |
| 1.1.2.6.01    | Hasil Sewa Tempat                                          |                  |                |     |
| 1.1.2.6.02    | Hasil Pungutan Desa                                        |                  |                |     |
|               | Dst .....                                                  |                  |                |     |
| 1.1.2.7       | Lain – lain Kekayaan Milik Desa                            |                  |                |     |
| 1.1.2.7.01    | Dst .....                                                  |                  |                |     |



|            |                                                                           |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.1.2.8    | Obyek Rekreasi / Wisata Milik Desa                                        |  |  |  |
| 1.1.2.8.01 | Hasil Penjualan karcis                                                    |  |  |  |
| 1.1.2.8.02 | Hasil Pungutan Pedagang                                                   |  |  |  |
| 1.1.2.8.03 | Hasil sewa kios                                                           |  |  |  |
| 1.1.2.8.04 | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| 1.1.3      | Hasil swadaya dan partisipasi                                             |  |  |  |
| 1.1.3.1    | Swadaya dalam bentuk nang                                                 |  |  |  |
| 1.1.3.2    | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| 1.1.4      | Hasil Gotong Royong                                                       |  |  |  |
| 1.1.4.1    | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| 1.1.5      | Lain –lain Pendapatan Asli Desa yang sah                                  |  |  |  |
| 1.1.5.1    | dst .....                                                                 |  |  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Bagi Hasil Pajak</b>                                                   |  |  |  |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak Kabupaten                                                |  |  |  |
| 1.2.2      | Bagi Hasil PBB                                                            |  |  |  |
| 1.2.3      | Alokasi Dana Khusus (ADK)                                                 |  |  |  |
| 1.2.4      | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| <b>1.3</b> | <b>Bagi Hasil Retribusi</b>                                               |  |  |  |
| 1.3.1      | Bagi Hasil Retribusi Pelabuhan dari Kabupaten                             |  |  |  |
| 1.3.2      | Bagi Hasil Kayu dari Kabupaten                                            |  |  |  |
| 1.3.3      | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| <b>1.4</b> | <b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>                  |  |  |  |
| 1.4.1      | Alokasi Dana Desa                                                         |  |  |  |
| 1.4.2      | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| <b>1.5</b> | <b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa dll</b> |  |  |  |
| 1.5.1      | Bantuan Kenangan Pemerintah Pusat                                         |  |  |  |
| 1.5.1.1    | Tugas Pembantuan Bidang Pertanian                                         |  |  |  |
| 1.5.1.2    | Program PNPMMP                                                            |  |  |  |
| 1.5.1.3    | Dst                                                                       |  |  |  |
| 1.5.2      | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi                                      |  |  |  |
| 1.5.2.1    | Pembangunan Perumahan Adat Terpencil                                      |  |  |  |
| 1.5.2.2    | Peningkatan Kinerja Aparatus Pemerintah Desa                              |  |  |  |
| 1.5.2.3    | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| 1.5.3      | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                |  |  |  |
| 1.5.3.1    | Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa                |  |  |  |
| 1.5.3.2    | Peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa                            |  |  |  |
| 1.5.3.3    | Bantuan Operasional RT                                                    |  |  |  |
| 1.5.3.4    | Bantuan Operasional Dusun                                                 |  |  |  |
| 1.5.3.5    | Bantuan uang purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                   |  |  |  |
| 1.5.3.6    | Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa (TPP)    |  |  |  |
| 1.5.3.7    | Bantuan Sosial Lembaga Adat                                               |  |  |  |
| 1.5.3.8    | Dst .....                                                                 |  |  |  |
| <b>1.6</b> | <b>Hibah</b>                                                              |  |  |  |
| 1.6.1.     | Hibah dari Pemerintah Pusat                                               |  |  |  |
| 1.6.2      | Hibah dari Pemerintah Propinsi                                            |  |  |  |
| 1.6.3      | Hibah dari Pemerintah Kabupaten                                           |  |  |  |
| 1.6.4      | Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi/Swasta                               |  |  |  |
| 1.6.5      | Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan                                 |  |  |  |
| 1.6.6      | Dst .....                                                                 |  |  |  |

|            |                                                                    |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.7        | Sumbangan Pihak Ketiga                                             |  |  |  |
| 1.7.1      | Sumbangan dari                                                     |  |  |  |
| 1.7.2      | dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                           |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2          | <b>BELANJA</b>                                                     |  |  |  |
| 2.1        | <b>Belanja Langsung</b>                                            |  |  |  |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai / Honorarium                                       |  |  |  |
| 2.1.1.1    | Honorarium tim / Panitia                                           |  |  |  |
| 2.1.1.1.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                              |  |  |  |
| 2.1.1.1.02 | Honorarium Panitia Pembangunan                                     |  |  |  |
| 2.1.1.1.03 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa                           |  |  |  |
| 2.1.1.1.04 | dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.1.2    | Uang Lembur                                                        |  |  |  |
| 2.1.1.2.01 | Uang lembur Aparat Kantor Desa                                     |  |  |  |
| 2.1.1.2.02 | dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.1.3    | Belanja Pelatihan /Kursus / Bimtek/ Sosialisasi                    |  |  |  |
| 2.1.1.3.01 | Biaya kursus, Pelatihan                                            |  |  |  |
| 2.1.1.3.02 | Biaya Sosialisasi                                                  |  |  |  |
| 2.1.1.3.03 | Biaya bimbingan Teknis                                             |  |  |  |
| 2.1.1.3.04 | Dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.2      | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                     |  |  |  |
| 2.1.2.1    | Belanja Perjalanan Dinas                                           |  |  |  |
| 2.1.2.1.01 | Perjalanan Dinas ke Kecamatan                                      |  |  |  |
| 2.1.2.1.02 | Perjalanan Dinas ke Kabupaten                                      |  |  |  |
| 2.1.2.1.03 | Perjalanan Dinas ke Propinsi                                       |  |  |  |
| 2.1.2.1.04 | Perjalanan Dinas Luar Propinsi                                     |  |  |  |
|            | Dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.2.2    | Belanja / Material                                                 |  |  |  |
| 2.1.2.2.01 | Belanja bahan baku bangunan                                        |  |  |  |
| 2.1.2.2.02 | Belanja bahan / bibit tanaman                                      |  |  |  |
| 2.1.2.2.03 | Belanja bibit Ternak                                               |  |  |  |
| 2.1.2.2.04 | Belanja bahan obat – obatan                                        |  |  |  |
| 2.1.2.2.05 | Belanja bahan kimia                                                |  |  |  |
| 2.1.2.2.06 | Dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.2.3    | Belanja Bahan Pakai habis                                          |  |  |  |
| 2.1.2.3.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                          |  |  |  |
| 2.1.2.3.02 | Belanja alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering ) |  |  |  |
| 2.1.2.3.03 | Belanja peran gko,materai, dan benda pos lainnya                   |  |  |  |
| 2.1.2.3.04 | Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   |  |  |  |
| 2.1.2.3.05 | Belanja BBM / Gas                                                  |  |  |  |
| 2.1.2.3.06 | Belanja pengisian Tabung Gas                                       |  |  |  |
| 2.1.2.3.07 | Dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |
| 2.1.2.4    | Belanja Jasa Kantor                                                |  |  |  |
| 2.1.2.4.01 | Belanja telepon                                                    |  |  |  |
| 2.1.2.4.02 | Belanja air                                                        |  |  |  |
| 2.1.2.4.03 | Belanja listrik                                                    |  |  |  |
| 2.1.2.4.04 | Belanja Surat kabar / majalah                                      |  |  |  |
| 2.1.2.4.05 | Belanja kawat / faksimil/ internet                                 |  |  |  |
| 2.1.2.4.06 | Belanja paket pengiriman                                           |  |  |  |
| 2.1.2.4.07 | Belanja sertifikasi                                                |  |  |  |
| 2.1.2.4.08 | Dst .....                                                          |  |  |  |
|            |                                                                    |  |  |  |



|             |                                                |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.1.2.5     | Belanja Premi Asuransi                         |  |  |  |
| 2.1.2.5.01  | Belanja premi asuransi kesehatan aparatur desa |  |  |  |
| 2.1.2.5.02  | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.6     | Belanja Perawatan Kendaraan bermotor           |  |  |  |
| 2.1.2.6.01  | Belanja jasa service                           |  |  |  |
| 2.1.2.6.02  | Belanja penggantian suku cadang                |  |  |  |
| 2.1.2.6.03  | Belanja BBM / Pelumas / oil                    |  |  |  |
| 2.1.2.6.04  | Belanja jasa KTR                               |  |  |  |
| 2.1.2.6.05  | Belanja STNK                                   |  |  |  |
| 2.1.2.6.06  | Belanja perpanjangan SIM                       |  |  |  |
| 2.1.2.6.07  | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.7     | Belanja Cetak dan Penggandaan                  |  |  |  |
| 2.1.2.7.01  | Belanja Cetak                                  |  |  |  |
| 2.1.2.7.02  | Belanja Penggandaan                            |  |  |  |
| 2.1.2.7.03  | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.8     | Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir      |  |  |  |
| 2.1.2.8.01  | Belanja sewa rumah jabatan / dinas             |  |  |  |
| 2.1.2.8.02  | Belanja sewa kantor / gedung                   |  |  |  |
| 2.1.2.8.03  | Belanja sewa rapat / pertemuan                 |  |  |  |
| 2.1.2.8.03  | Belanja sewa tempat kantor                     |  |  |  |
|             | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.9     | Belanja sewa sarana mobilitas                  |  |  |  |
| 2.1.2.9.01  | Belanja sewa sarana mobilitas darat            |  |  |  |
| 2.1.2.9.02  | Belanja sewa sarana mobilitas air              |  |  |  |
| 2.1.2.9.03  | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.10    | Belanja sewa alat berat                        |  |  |  |
| 2.1.2.10.01 | Belanja sewa eskavator                         |  |  |  |
| 2.1.2.10.02 | Belanja sewa boldozer                          |  |  |  |
| 2.1.2.10.03 | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.11    | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor |  |  |  |
| 2.1.2.11.01 | Belanja sewa meja kursi                        |  |  |  |
| 2.1.2.11.02 | Belanja sewa tenda                             |  |  |  |
| 2.1.2.11.03 | Belanja sewa generator                         |  |  |  |
| 2.1.2.11.04 | Belanja sewa pakaian adat / tradisional        |  |  |  |
| 2.1.2.11.05 | dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.12    | Belanja makan dan minum                        |  |  |  |
| 2.1.2.12.01 | Belanja makan dan minum harian                 |  |  |  |
| 2.1.2.12.02 | Belanja makan dan minum rapat                  |  |  |  |
| 2.1.2.12.03 | Belanja makan dan minum tamu                   |  |  |  |
| 2.1.2.12.04 | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
| 2.1.2.13    | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut              |  |  |  |
| 2.1.2.13.01 | Belanja pakaian dinas harian                   |  |  |  |
| 2.1.2.13.02 | Belanja pakaian dinas upacara                  |  |  |  |
| 2.1.2.13.03 | Belanja pakaian dinas lapangan                 |  |  |  |
| 2.1.2.13.04 | Belanja pakaian batik                          |  |  |  |
| 2.1.2.13.05 | Belanja pakaian adat tradisional               |  |  |  |
| 2.1.2.13.06 | Belanja pakaian olah raga                      |  |  |  |
| 2.1.2.13.07 | Dst .....                                      |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |
|             |                                                |  |  |  |

|                |                                                                    |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.1.3</b>   | <b>Belanja Modal</b>                                               |  |  |  |
| 2.1.3.1        | Belanja modal pengadaan tanah                                      |  |  |  |
| 2.1.3.1.01     | Belanja modal pengadaan tanah kantor                               |  |  |  |
| 2.1.3.1.02     | Belanja modal pengadaan tanah kas desa                             |  |  |  |
| 2.1.3.1.03     | Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan                     |  |  |  |
| 2.1.3.1.04     | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan                    |  |  |  |
| 2.1.3.1.05     | Belanja modal pengadaan tanah sarana prasarana umum                |  |  |  |
| 2.1.3.1.06     | Belanja modal pengadaan tanah sarana prasarana sosial              |  |  |  |
| 2.1.3.1.07     | Belanja modal pengadaan tanah sarana ibadah                        |  |  |  |
| 2.1.3.1.08     | Belanja modal pengadaan tanah perumahan                            |  |  |  |
| 2.1.3.1.09     | Belanja modal pengadaan tanah pertanian                            |  |  |  |
| 2.1.3.1.10     | Belanja modal pengadaan tanah perkebunan                           |  |  |  |
| 2.1.3.1.11     | Belanja modal pengadaan tanah perikanan                            |  |  |  |
| 2.1.3.1.12     | Belanja modal pengadaan tanah peternakan                           |  |  |  |
| 2.1.3.1.13     | Belanja modal pengadaan tanah perkampungan / pemukiman             |  |  |  |
| 2.1.3.1.14     | Belanja modal pengadaan tanah pergudangan / tempat penimbunan      |  |  |  |
| 2.1.3.1.15     | Dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.2</b> | <b>Belanja modal Pengadaan Jaringan</b>                            |  |  |  |
| 2.1.3.2.01     | Pengadaan jaringan instalasi listrik Desa                          |  |  |  |
| 2.1.3.2.02     | Pengadaan jaringan instalasi Telepon Desa                          |  |  |  |
| 2.1.3.2.03     | Pengadaan jaringan instalasi Air Bersih Desa                       |  |  |  |
| 2.1.3.2.04     | Dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.3</b> | <b>Belanja modal Pengadaan alat – alat Berat</b>                   |  |  |  |
| 2.1.3.3.01     | Belanja modal pengadaan hand traktor                               |  |  |  |
| 2.1.3.3.02     | dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.4</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor</b>        |  |  |  |
| 2.1.3.4.01     | Belanja modal pengadaan kendaraan darat roda empat / mobil         |  |  |  |
| 2.1.3.4.02     | Belanja modal pengadaan kendaraan darat roda dua / sepeda motor    |  |  |  |
| 2.1.3.4.03     | Belanja modal pengadaan kendaraan darat roda tiga                  |  |  |  |
| 2.1.3.4.04     | Dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.5</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat angkutan darat tidak bermotor</b>  |  |  |  |
| 2.1.3.5.01     | Belanja modal pengadaan gerobak                                    |  |  |  |
| 2.1.3.5.02     | Belanja modal pengadaan becak                                      |  |  |  |
| 2.1.3.5.03     | Belanja modal pengadaan sepeda                                     |  |  |  |
| 2.1.3.5.04     | Dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.6</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan di Air bermotor</b>       |  |  |  |
| 2.1.3.6.01     | Belanja modal pengadaan kapal motor                                |  |  |  |
| 2.1.3.6.02     | Belanja modal pengadaan speed boat                                 |  |  |  |
| 2.1.3.6.03     | Dst .....                                                          |  |  |  |
| <b>2.1.3.7</b> | <b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan di Air tidak Bermotor</b> |  |  |  |
| 2.1.3.7.01     | Belanja modal pengadaan perahu / sampan                            |  |  |  |
| 2.1.3.7.02     | Belanja modal pengadaan perahu karet                               |  |  |  |
| 2.1.3.7.03     | Dst .....                                                          |  |  |  |



|                 |                                                                       |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.1.3.8</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Bengkel</b>                    |  |  |  |
| 2.1.3.8.01      | Belanja modal pengadaan alat las                                      |  |  |  |
| 2.1.3.8.02      | Belanja modal pengadaan mesin bubut                                   |  |  |  |
| 2.1.3.8.03      | Belanja modal pengadaan mesin dongkrak                                |  |  |  |
| 2.1.3.8.04      | Belanja modal pengadaan kompresor                                     |  |  |  |
| 2.1.3.8.05      | Dst .....                                                             |  |  |  |
|                 |                                                                       |  |  |  |
| <b>2.1.3.9</b>  | <b>Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian / Peternakan</b> |  |  |  |
| 2.1.3.9.01      | Belanja modal pengadaan penggilingan hasil pertanian                  |  |  |  |
| 2.1.3.9.02      | Belanja modal pengadaan alat penbgering gabah                         |  |  |  |
| 2.1.3.9.03      | Belanja modal pengadaan mesin bajak                                   |  |  |  |
| 2.1.3.9.04      | Belanja modal pengadaan alat penetas                                  |  |  |  |
| 2.1.3.9.05      | Dst .....                                                             |  |  |  |
|                 |                                                                       |  |  |  |
| <b>2.1.3.10</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>                       |  |  |  |
| 2.1.3.10.01     | Belanja modal pengadaan mesin tik                                     |  |  |  |
| 2.1.3.10.02     | Belanja modal pengadaan mesin bitung                                  |  |  |  |
| 2.1.3.10.03     | Belanja modal pengadaan mesin stensil                                 |  |  |  |
| 2.1.3.10.04     | Belanja modal pengadaan mesin foto copy                               |  |  |  |
| 2.1.3.10.05     | Belanja modal pengadaan mesin cetak                                   |  |  |  |
| 2.1.3.10.06     | Belanja modal pengadaan mesin jilid                                   |  |  |  |
| 2.1.3.10.07     | Belanja modal pengadaan mesin potong kertas                           |  |  |  |
| 2.1.3.10.08     | Belanja modal pengadaan alat pemadam kebakaran                        |  |  |  |
| 2.1.3.10.09     | Dst .....                                                             |  |  |  |
|                 |                                                                       |  |  |  |
| <b>2.1.3.11</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>                    |  |  |  |
| 2.1.3.11.01     | Belanja modal pengadaan meja / kursi /gambar                          |  |  |  |
| 2.1.3.11.02     | Belanja modal pengadaan almari                                        |  |  |  |
| 2.1.3.11.03     | Belanja modal pengadaan brankas                                       |  |  |  |
| 2.1.3.11.04     | Belanja modal pengadaan filling kabinet                               |  |  |  |
| 2.1.3.11.05     | Belanja modal pengadaan White board                                   |  |  |  |
| 2.1.3.11.06     | Belanja modal pengadaan papan nama kantor                             |  |  |  |
| 2.1.3.11.07     | Dst .....                                                             |  |  |  |
|                 |                                                                       |  |  |  |
| <b>2.1.3.12</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>                               |  |  |  |
| 2.1.3.12.01     | Belanja modal Pengadaan komputer                                      |  |  |  |
| 2.1.3.12.02     | Belanja modal pengadaan note book / laptop                            |  |  |  |
| 2.1.3.12.03     | Belanja modal pengadaan printer                                       |  |  |  |
| 2.1.3.12.04     | Belanja modal pengadaan scanner                                       |  |  |  |
| 2.1.3.12.05     | Belanja modal pengadaan minitor / display                             |  |  |  |
| 2.1.3.12.06     | Belanja modal pengadaan CPU                                           |  |  |  |
| 2.1.3.12.07     | Belanja modal pengadaan UPS / stabilizer                              |  |  |  |
| 2.1.3.12.08     | Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (mouse, hardisk, dll)    |  |  |  |
| 2.1.3.12.09     | Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer                   |  |  |  |
| 2.1.3.12.10     | Dst .....                                                             |  |  |  |
|                 |                                                                       |  |  |  |
| <b>2.1.3.13</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>                              |  |  |  |
| 2.1.3.13.01     | Belanja modal pengadaan meja kerja                                    |  |  |  |
| 2.1.3.13.02     | Belanja modal pengadaan meja rapat                                    |  |  |  |
| 2.1.3.13.03     | Belanja modal pengadaan meja makan                                    |  |  |  |
| 2.1.3.13.04     | Belanja modal pengadaan kursi kerja                                   |  |  |  |
| 2.1.3.13.05     | Belanja modal pengadaan kursi rapat                                   |  |  |  |
| 2.1.3.13.06     | Belanja modal pengadaan kursi makan                                   |  |  |  |
| 2.1.3.13.07     | Belanja modal pengadaan tempat tidur                                  |  |  |  |
| 2.1.3.13.08     | Belanja modal pengadaan sofa                                          |  |  |  |
| 2.1.3.13.09     | Belanja modal pengadaan rak buku /TV/kembang                          |  |  |  |
| 2.1.3.13.10     | dst .....                                                             |  |  |  |

|                  |                                                                  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.14</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>                   |  |  |  |
| 2.1.3.14.01      | Belanja modal pengadaan tabung gas                               |  |  |  |
| 2.1.3.14.02      | Belanja modal pengadaan kompor gas                               |  |  |  |
| 2.1.3.14.03      | Belanja modal pengadaan lemari makan                             |  |  |  |
| 2.1.3.14.04      | Belanja modal pengadaan dispenser                                |  |  |  |
| 2.1.3.14.05      | Belanja modal pengadaan kulkas                                   |  |  |  |
| 2.1.3.14.06      | Belanja modal pengadaan rak piring                               |  |  |  |
| 2.1.3.14.07      | Belanja modal pengadaan piring/gelas/sendok/garpu/pisau/dll      |  |  |  |
| 2.1.3.14.08      | Belanja modal pengadaan tabung aqua                              |  |  |  |
| 2.1.3.14.09      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.15</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Kantor</b>           |  |  |  |
| 2.1.3.15.01      | Belanja modal pengadaan lampu hias                               |  |  |  |
| 2.1.3.15.02      | Belanja modal pengadaan jam dinding                              |  |  |  |
| 2.1.3.15.03      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.16</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat –Alat Studio</b>                 |  |  |  |
| 2.1.3.16.01      | Belanja modal pengadaan kamera                                   |  |  |  |
| 2.1.3.16.02      | Belanja modal pengadaan handycam                                 |  |  |  |
| 2.1.3.16.03      | Belanja modal pengadaan Proyektor /LCD                           |  |  |  |
| 2.1.3.16.04      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.17</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat –Alat Komunikasi</b>             |  |  |  |
| 2.1.3.17.01      | Belanja modal pengadaan telephone kantro                         |  |  |  |
| 2.1.3.17.02      | Belanja modal pengadaan faximile                                 |  |  |  |
| 2.1.3.17.03      | Belanja modal pengadaan radio SSB                                |  |  |  |
| 2.1.3.17.04      | Belanja modal pengadaan radio /HT                                |  |  |  |
| 2.1.3.17.05      | Belanja modal pengadaan TV                                       |  |  |  |
| 2.1.3.17.06      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.18</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat– Alat Ukur</b>                   |  |  |  |
| 2.1.3.18.01      | Belanja modal pengadaan timbangan                                |  |  |  |
| 2.1.3.18.02      | Belanja modal pengadaan alat GPS                                 |  |  |  |
| 2.1.3.18.03      | Belanja modal pengadaan kompas / peralatan navigasi              |  |  |  |
| 2.1.3.18.04      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.19.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan</b>                   |  |  |  |
| 2.1.3.19.01      | Belanja modal pengadaan pembangunan/pemeliharaan jalan           |  |  |  |
| 2.1.3.19.02      | Belanja modal pengadaan pembangunan/pemeliharaan gang lingkungan |  |  |  |
| 2.1.3.19.03      | Belanja modal pengadaan gorong - gorong                          |  |  |  |
| 2.1.3.19.04      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.20</b>  | <b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan</b>                |  |  |  |
| 2.1.3.20.01      | Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan gantung               |  |  |  |
| 2.1.3.20.02      | Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan ponton                |  |  |  |
| 2.1.3.20.03      | Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan lingkungan            |  |  |  |
| 2.1.3.20.04      | Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan atas air              |  |  |  |
| 2.1.3.20.01      | dst .....                                                        |  |  |  |
|                  |                                                                  |  |  |  |



|                 |                                                                  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.1.3.21        | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air                   |  |  |  |
| 2.1.3.21.01     | Belanja modal pengadaan kontruksi bendungan                      |  |  |  |
| 2.1.3.21.02     | Belanja modal pengadaan kontruksi waduk                          |  |  |  |
| 2.1.3.21.03     | Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan irigasi               |  |  |  |
| 2.1.3.21.04     | Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air bersih            |  |  |  |
| 2.1.3.21.05     | Belanja modal pengadaan kontruksi pintu air                      |  |  |  |
| 2.1.3.21.06     | Dst .....                                                        |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.22</b> | <b>Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan desa</b>       |  |  |  |
| 2.1.3.22.01     | Belanja modal pengadaan penerangan fasilitas umum lainnya        |  |  |  |
| 2.1.3.22.02     | Belanja modal pengadaan lampu penerangan fasilitas umum lainnya  |  |  |  |
| 2.1.3.22.03     | dst .....                                                        |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.23</b> | <b>Belanja Modal pengadaan bangunan gedung / kantor</b>          |  |  |  |
| 2.1.3.23.01     | Belanja modal pengesahan bangunan gedung/kantor                  |  |  |  |
| 2.1.3.23.02     | Belanja modal pengadaan bangunan rumah dinas                     |  |  |  |
| 2.1.3.23.03     | Belanja modal pengadaan bangunan gudang                          |  |  |  |
| 2.1.3.23.04     | Belanja modal pengadaan bangunan tugu/monumen/gapura/batas desa  |  |  |  |
| 2.1.3.23.05     | Belanja modal pengadaan bangunan sarana sosial                   |  |  |  |
| 2.1.3.23.06     | Belanja modal pengadaan bangunan sarana keagamaan                |  |  |  |
| 2.1.3.23.07     | Belanja modal pengadaan sarana prasarana umum                    |  |  |  |
| 2.1.3.23.08     | Belanja modal pengadaan sarana kesehatan                         |  |  |  |
| 2.1.3.23.09     | Belanja modal pengada sarana pendidikan                          |  |  |  |
| 2.1.3.23.10     | Belanja modal pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana air bersih |  |  |  |
| 2.1.3.23.11     | Belanja modal pengadaan sarana perhubungan                       |  |  |  |
| 2.1.3.23.12     | dst .....                                                        |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.3.24</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan</b>                |  |  |  |
| 2.1.3.24.01     | Belanja modal pengadaan buku – buku kepustakaan                  |  |  |  |
| 2.1.3.24.02     | Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang - undangan      |  |  |  |
| 2.1.3.24.03     | Belanja modal pengadaan buku naskah                              |  |  |  |
| 2.1.3.24.04     | dst .....                                                        |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.2.25</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya</b>   |  |  |  |
| 2.1.2.25.01     | Belanja modal pengadaan lukisan / foto                           |  |  |  |
| 2.1.2.25.02     | Belanja modal pengadaan patung                                   |  |  |  |
| 2.1.2.25.03     | Belanja modal pengadaan ukiran                                   |  |  |  |
| 2.1.2.25.04     | Belanja modal pengadaan pahatan                                  |  |  |  |
| 2.1.2.25.05     | Belanja modal pengadaan batu alam                                |  |  |  |
| 2.1.2.25.06     | Dst .....                                                        |  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |  |
| <b>2.1.2.26</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan hewan ternak/tanaman</b>              |  |  |  |
| 2.1.2.26.01     | Belanja Modal Pengadaan ternak                                   |  |  |  |
| 2.1.2.26.02     | Belanja Modal Pengadaan tanaman                                  |  |  |  |
| 2.1.2.26.03     | dst .....                                                        |  |  |  |

|              |                                                                          |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.2</b>   | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                            |  |  |  |
| <b>2.2.1</b> | <b>Belanja pegawai / Penghasilan tetap</b>                               |  |  |  |
| 2.2.1.1      | Gaji dan tunjangan                                                       |  |  |  |
| 2.2.1.1.01   | Tunjangan penghasilan                                                    |  |  |  |
| 2.2.1.1.02   | Tunjangan Jabatan                                                        |  |  |  |
| 2.2.1.1.03   | Tunjangan fungsional                                                     |  |  |  |
| 2.2.1.1.04   | Uang duka wafat / tewas                                                  |  |  |  |
| 2.2.1.1.05   | Uang jasa pengabdian / purna tugas                                       |  |  |  |
| 2.2.1.1.06   | dst .....                                                                |  |  |  |
| 2.2.1.2      | Tunjangan Tambahan Penghasilan                                           |  |  |  |
| 2.2.1.2.01   | Tambahan penghasilan beban kerja                                         |  |  |  |
| 2.2.1.2.02   | Tambahan penghasilan tempat bertugas                                     |  |  |  |
| 2.2.1.2.03   | Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja                          |  |  |  |
| 2.2.1.2.04   | Dst .....                                                                |  |  |  |
| 2.2.1.3      | Belanja Penerimaan Lainnya                                               |  |  |  |
| 2.2.1.3.01   | Belanja penunjang operasional BPD                                        |  |  |  |
| 2.2.1.3.02   | dst .....                                                                |  |  |  |
| 2.2.3        | Belanja Hibah                                                            |  |  |  |
| 2.2.3.1      | dst .....                                                                |  |  |  |
| 2.2.4        | Belanja Bantuan Sosial                                                   |  |  |  |
| 2.2.4.1      | Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                  |  |  |  |
| 2.2.4.2      | Belanja bantuan sosial Fakir Miskin                                      |  |  |  |
| 2.2.4.3      | Belanja bantuan sosial Yatim Piatu                                       |  |  |  |
| 2.2.4.4      | Belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan                         |  |  |  |
| 2.2.4.5      | Belanja bantuan sosial organisasi keagamaan                              |  |  |  |
| 2.2.4.6      | Belanja bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan                           |  |  |  |
| 2.2.4.7      | Belanja bantuan sosial keagamaan                                         |  |  |  |
| 2.2.4.8      | Dst .....                                                                |  |  |  |
| 2.2.5        | Belanja Bantuan Keuangan                                                 |  |  |  |
| 2.2.5.1      | Belanja bantuan keuangan Operasional Lembaga kemasyarakatan desa dan BPD |  |  |  |
| 2.2.5.1.01   | Belanja bantuan keuangan kepada RT                                       |  |  |  |
| 2.2.5.1.02   | Belanja bantuan keuangan kepada dusun                                    |  |  |  |
| 2.2.5.1.03   | Belanja bantuan keuangan kepada PKK                                      |  |  |  |
| 2.2.5.1.04   | Belanja bantuan keuangan Adat Desa                                       |  |  |  |
| 2.2.5.1.05   | Belanja bantuan keuangan LPM Desa                                        |  |  |  |
| 2.2.5.1.06   | Belanja bantuan keuangan Karang taruna                                   |  |  |  |
| 2.2.5.1.07   | Belanja bantuan keuangan BPD                                             |  |  |  |
| 2.2.5.2      | Belanja bantuan keuangan pelaksanaan Pilkades/Pemilihan BPD              |  |  |  |
| 2.2.5.3      | Belanja bantuan keuangan Pelantikan Kepala Desa dan BPD                  |  |  |  |
| 2.2.5.4      | Belanja bantuan keuangan Operasional Linmas                              |  |  |  |
| 2.2.5.5      | Belanja bantuan keuangan Musyawarah Pemerintahan Desa                    |  |  |  |
| 2.2.5.6      | Belanja bantuan keuangan pelaksanaan Lomba Desa                          |  |  |  |
| 2.2.5.7      | Belanja bantuan keuangan Penilaian Kades Berprestasi                     |  |  |  |
| 2.2.5.8      | Belanja bantuan keuangan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat            |  |  |  |
| 2.2.5.9      | Belanja bantuan keuangan Kelompok usaha masyarakat Desa                  |  |  |  |
| 2.2.5.10     | dst .....                                                                |  |  |  |



|            |                                               |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 2.2.6      | Belanja Tak Terduga                           |  |  |  |
| 2.2.6.1    | Keadaan Sarurat                               |  |  |  |
| 2.2.6.2    | Bencana Alam                                  |  |  |  |
| 2.2.6.3    | Penanganan keamanan dan ketertiban            |  |  |  |
| 2.2.6.4    | dst .....                                     |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                         |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
| <b>3</b>   | <b>PEMBLAYAAN</b>                             |  |  |  |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                  |  |  |  |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)       |  |  |  |
| 3.1.2      | Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan |  |  |  |
| 3.1.3      | Penerimaan Pinjaman Desa                      |  |  |  |
| 3.1.4      | Pencairan Dana Cadangan                       |  |  |  |
| 3.1.5      | dst .....                                     |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>           |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                 |  |  |  |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                     |  |  |  |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal Desa                         |  |  |  |
| 3.2.3      | Pembayaran Utang /pokokutang                  |  |  |  |
| 3.2.4      | Pemberian pinjaman                            |  |  |  |
| 3.2.5      | dst .....                                     |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>          |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |
|            |                                               |  |  |  |

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR